



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**Nemsina br Sitorus**, domisili Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah,  
Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang  
bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi  
serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ, tanggal 22 Maret 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa karena kelalaian Pemohon ketika mengurus Akta Perkawinan Pemohon atas nama, Benny Ginting dengan Nemsina Br Karo, Nomor Akta Perkawinan: 1206-KW-03042014-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

Bahwa karena kelalaian Pemohon ketika mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Biankha Saputri Br Ginting, perempuan, Lahir di Kabanjahe, Tanggal **25-05-2014** Anak ke lima dari **Benny Ginting** dan **Nemsina Br Karo**, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-18052015-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

Bahwa pada Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis nama Pemohon adalah **NEMSINA BR KARO**, yang

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya **NEMSINA BR SITORUS** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206046311850008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1206043101082056, dan arena terdapat perbedaan tersebut, anak Pemohon mendapatkan kesulitan administrasi di sekolahnya;

Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan juga Akta perkawinan Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan tersebut Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri yang memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada kutipan Akta kelahiran dan Akta perkawinan atas nama :

1. **Benny Ginting dengan Nemsina Br Karo**, Nomor Akta Perkawinan : 1206-KW-03042014-0042 yang seharusnya **Benny Ginting dengan Nemsina Br Sitorus** sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206046311850008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1206043101082056;
2. **Biankha Saputri Br Ginting**, Nomor Akta Kelahiran : 1206-LT-18052015-0016, lahir di Kabanjahe, Tanggal **25-05-2014** Anak ke lima dari **Benny Ginting** dan **Nemsina Br Karo**, yang seharusnya **Biankha Saputri Br Ginting**, Nomor Akta Kelahiran : 1206-LT-18052015-0016, lahir di Kabanjahe, Tanggal **25-05-2014** Anak ke lima dari **Benny Ginting** dan **Nemsina Br Sitorus**, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206046311850008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1206043101082056;

dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Registrasi Kelahiran Pemohon, Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut setelah di salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon atas nama :

**1. Benny Ginting dengan Nemsina Br Karo**, Nomor Akta Perkawinan : 1206-KW-03042014-0042 yang seharusnya **Benny Ginting dengan Nemsina Br Sitorus sesuai** Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206046311850008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1206043101082056;

**2. Biankha Saputri Br Ginting**, Nomor Akta Kelahiran : 1206-LT-18052015-0016, lahir di Kabanjahe, Tanggal **25-05-2014** Anak ke lima dari **Benny Ginting** dan **Nemsina Br Karo**, yang seharusnya **Biankha Saputri Br Ginting**, Nomor Akta Kelahiran : 1206-LT-18052015-0016, lahir di Kabanjahe, Tanggal **25-05-2014** Anak ke lima dari **Benny Ginting** dan **Nemsina Br Sitorus, sesuai** Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206046311850008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1206043101082056;

- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Registrasi Kelahiran Pemohon, Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut setelah di salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1206046311850008 an. Nemsina Br Sitorus;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1206043101082056 atas nama kepala keluarga Benny Ginting;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-03042014-0042 antara Benny Ginting dengan Nemsina Br Karo;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-18052015-0016 atas nama Biankha Saputri Br Ginting;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1, Benny Ginting;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon yang salah di dokumen Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Biankha Saputri Br Ginting;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nemsina Br Sitorus;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Biankha Saputri Br Ginting adalah Nemsina Br Karo;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 November 2013;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua kandung Pemohon adalah Lansen Sitorus dan Linda Br Lubis sedangkan nama orangtua angkat Pemohon adalah Salmon Karo-Karo dan Asni Br Ginting;
- Bahwa terjadi kesalahan nama Pemohon dari Nemsina Br Sitorus menjadi Nemsina Br Karo karena Pemohon diangkat oleh orangtuanya Salmon Karo-Karo sehingga dibuat beru/ boru Pemohon sama dengan marga bapak angkatnya tersebut;
- Bahwa Saksi menikahi Pemohon pada saat itu umur Pemohon 21 Tahun;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki namanya dalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak yaitu untuk menyeragamkan identitas Pemohon disemua dokumen Pemohon dan juga untuk keperluan sekolah anak Pemohon;

Saksi 2, Sri Hertika Fransiska Br Sinuraya;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon yang salah di dokumen Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Biankha Saputri Br Ginting;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nemsina Br Sitorus;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Biankha Saputri Br Ginting adalah Nemsina Br Karo;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 November 2013;
- Bahwa nama orangtua kandung Pemohon adalah Lansen Sitorus dan Linda Br Lubis sedangkan nama orangtua angkat Pemohon adalah Salmon Karo-Karo dan Asni Br Ginting;
- Bahwa terjadi kesalahan nama Pemohon dari Nemsina Br Sitorus menjadi Nemsina Br Karo karena Pemohon diangkat oleh orangtuanya Salmon Karo-Karo sehingga dibuat beru/ boru Pemohon sama dengan marga bapak angkatnya tersebut;
- Bahwa Pemohon menikahi pada saat itu umur Pemohon 21 Tahun;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon memperbaiki namanya dalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak yaitu untuk menyeragamkan identitas Pemohon disemua dokumen Pemohon dan juga untuk keperluan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni Benny Ginting dan Sri Hertika Fransiska Br Sinuraya, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kabanjahe

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Nemsina Br Sitorus sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Vide bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Benny Ginting dan perkawinan Pemohon dengan Benny Ginting telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Anak kelima pemohon bernama Biankha Saputri br Ginting (Vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa pada kutipan akta perkawinan dan kutipan akta kelahiran anak kelima pemohon, nama pemohon tertera Nemsina Br Karo (Vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nemsina Br Sitorus (ketrangan saksi Benny Ginting dan saksi Sri Hertika Fransiska Br Sinuraya);

Menimbang, bahwa yang diajukan permohonan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah Pemohon ingin merubah nama pemohon pada kutipan akta perkawinan pemohon dan kutipan akta kelahiran anak kelima pemohon atas nama Biankha Saputri br Ginting dari Nemsina Br Karo menjadi Nemsina Br Sitorus. Memperhatikan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana terurai diatas. Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon pada kutipan akta perkawinan pemohon dan kutipan akta kelahiran anak kelima pemohon adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari Pemohon dan Anak Kelima Pemohon kedepannya. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi pertanyaan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ



hukum apabila dikaitkan dengan inti permohonan Pemohon. Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.  
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kbj





perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat *eksepsional* dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 44 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 disebutkan dalam Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Memperhatikan ketentuan tersebut, pada pokoknya perubahan nama bisa

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ



dilakukan oleh setiap penduduk berdasarkan penetapan Pengadilan, termasuk perbaikan nama yang salah/keliru dalam suatu Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian maka perubahan nama yang tercantum dalam Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon atas nama Biankha Saputri br Ginting tersebut, menurut Hakim dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Kelima Pemohon atas nama :

1. **Benny Ginting dengan Nemsina Br Karo**, Nomor Akta Perkawinan : 1206-KW-03042014-0042 yang seharusnya **Benny Ginting dengan Nemsina Br Sitorus** sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206046311850008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1206043101082056;
2. **Biankha Saputri Br Ginting**, Nomor Akta Kelahiran : 1206-LT-18052015-0016, lahir di Kabanjahe, Tanggal **25-05-2014** Anak ke lima dari **Benny Ginting** dan **Nemsina Br Karo**, yang seharusnya **Biankha Saputri Br Ginting**, Nomor Akta Kelahiran : 1206-LT-18052015-0016, lahir di Kabanjahe, Tanggal **25-05-2014** Anak ke lima dari **Benny Ginting** dan **Nemsina Br Sitorus**, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206046311850008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1206043101082056;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (2) berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan Ayat (3) berbunyi "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ



Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil". berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang salah/keliru dalam suatu Akta Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, jadi adanya perubahan/perbaikan nama yang salah/keliru dalam suatu pada Akta Pencatatan Sipil tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Kelima Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat dan penambahan amar karena amanat undang-undang dalam amar putusan sesuai dengan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Kelima Pemohon atas nama :
  - a. **Benny Ginting dengan Nemsina Br Karo**, Nomor Akta Perkawinan : 1206-KW-03042014-0042 yang seharusnya **Benny Ginting dengan Nemsina Br Sitorus** sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206046311850008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1206043101082056;
  - b. **Biankha Saputri Br Ginting**, Nomor Akta Kelahiran : 1206-LT-18052015-0016, lahir di Kabanjahe, Tanggal **25-05-2014** Anak ke lima dari **Benny Ginting dan Nemsina Br Karo**, yang seharusnya **Biankha Saputri Br Ginting**, Nomor Akta Kelahiran : 1206-LT-18052015-0016, lahir di Kabanjahe, Tanggal **25-05-2014** Anak ke lima dari **Benny Ginting dan Nemsina Br Sitorus**, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206046311850008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1206043101082056;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Kelima Pemohon atas nama Biankha Saputri Br Ginting tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil memperbaiki atau membuat catatan pinggir perihal perubahan nama pemohon tersebut dalam Akta Perkawinan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Kelima Pemohon nomor 1206-LT-18052015-0016 atas nama Biankha Saputri Br Ginting;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 22 Maret 2024 sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Kbj